

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Belajar dipahami sebagai aktivitas situasional yang berlangsung dalam waktu dan konteks sosio-historis tertentu. Oleh karena itu, mempelajari pembelajaran perlu mempertimbangkan konteks atau muatan isi pembelajaran (Grossen et al., 2020). Belajar biasanya dilakukan dengan hati dan pikiran. Jika suasana belajar penuh dengan ketakutan maka akan menghambat proses pembelajaran yang lebih tinggi (Qamar, 2021). Belajar tidak terbatas pada operasi kognitif, tetapi berakar pada seperangkat praktik yang berlangsung dalam konteks tertentu memiliki sumber daya pribadi dan sosial (Grossen et al., 2020). Area kunci ini berusaha untuk memastikan bahwa metode pengajaran dipilih untuk mendukung proses pembelajaran terbaik di mana siswa akan mencapai hasil belajar yang ditentukan yang diidentifikasi dalam tujuan (Sid, 2002).

Belajar dianggap sebagai proses, dalam konstruksi dan rekonstruksi berkelanjutan, yang terjadi melalui interaksi pengetahuan individu dengan pengetahuan lingkungan, gaya belajar bukanlah sifat psikologis atau kognitif yang tetap, melainkan hasil interaksi antara orang dan lingkungan (Dantas & Cunha, 2020). Praktik belajar dan interaksi bersama dapat dilihat sebagai respons terhadap keterjangkauan sosial ruang sekolah (Reinius et al., 2021). Pendidikan formal mengintegrasikan mata pelajaran ke lingkungan mereka, memungkinkan pengembangan keterampilan kognitif dan sosial, memberikan akses ke warisan budaya yang terakumulasi oleh sejarah umat manusia, dan memungkinkan kemajuan warisan ini, melalui penciptaan pengetahuan baru (Dantas & Cunha, 2020).

Pendidikan salah satu agen masyarakat paling berpengaruh untuk mempertahankan nilai-nilai adalah sekolah. Selama berabad-abad, pihak berwenang telah menganggap pendidikan sebagai alat yang berguna untuk menanamkan dan memahami perilaku dan nilai dalam generasi baru (Toker Gökçe, 2021). Sistem pendidikannya adalah jalur tunggal, yaitu anak-anak sering tinggal dan belajar di sekolah yang sama selama 12 tahun, sekolah mengikuti kurikulum yang sama (Pöder & Lauri, 2021). Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia diberbagai bidang dan salah satunya dibidang pendidikan, hal ini dikarenakan sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam pembangunan bangsa (Dudung, 2018).

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia (INDONESIA, 2016).

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan Panjang (Tolstenko et al., 2019) menunjukkan bagaimana pendidikan, yang merupakan bentuk aktivitas terpenting dalam media sosial, mengubah citra budaya dan kesadaran individu, serta membentuk dan mengubah sikap politik mereka terhadap realitas sehari-hari di sekitarnya. Analisis perbandingan digunakan untuk mengeksplorasi sistem pendidikan kewarganegaraan yang membentuk identitas kebangsaan dan kenegaraan seseorang sebagai turunan dari "komunitas imajiner". Pengalaman kesadaran nasional yang menciptakan makna adalah bahan untuk membangun komunitas yang dibayangkan, logis bahwa wacana politik modern menggunakan gagasan seperti 'kewarganegaraan global', 'kewarganegaraan digital',

dan 'kewarganegaraan media' (Tolstenko & Baltovskij, 2018). Pendidikan kewarganegaraan seringkali bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang negara bangsa dan menanamkan rasa identitas nasional dan kesetiaan kepada bangsa (Yuen, 2016). Harus diingatkan di sini bahwa literatur saat ini, sementara menerima kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membantu dalam mempromosikan identifikasi nasional, tetap waspada terhadap kemungkinan malpraktik dalam prosesnya (Jannah, 2023); (Bambang Suryadi et al., 2019); (Dikanaya Tarahita & Muhammad Zulfikar Rakhmat, 2017); (Arsyadhi et al., 2024); (Putri, 2023); (Wibowo et al., 2024); (Slamet Suyanto, 2017). Kurikulum di Indonesia dimulai pada 1975 tentang pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal Civics. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn sebagai proses pembentukan identitas nasional (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2007).

Penelitian kurikulum internasional menunjukkan bahwa negara-negara sepakat bahwa pendidikan harus menumbuhkan demokrasi, meningkatkan keamanan nasional, dan menghubungkan negara-negara melalui pembangunan global (Wahlström, 2018). Ada dorongan internasional untuk meningkatkan sistem pendidikan dan hasil siswa. Hal ini sebagian disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi pengetahuan global, di mana modal intelektual semakin dihargai sebagai sarana untuk memastikan kesuksesan ekonomi (Harris, 2021). Diyakini bahwa hubungan antara negara dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang lebih demokratis. Gagasannya adalah bahwa keputusan (politik) akan menjadi lebih mendarah daging dalam strata masyarakat yang lebih luas, sementara tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan asosiasi studi akan mendorong demokrasi warga negara. (Fejes, 2019). Dimana makna pendidikan kebangsaan dirancang untuk menciptakan perubahan sosial di beberapa komunitas. Sangat umum bahwa perbedaan dapat menyebabkan ketegangan atau konflik komunitas, seperti sebagai berbeda budaya, agama, bahasa dan yang lainnya (Komarudin et al., 2019). Proses pembelajaran di Indonesia tentang Pendidikan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila selayaknya

ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter (DIKDAS, 2021). Pancasila ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pendidikan kewarganegaraan berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Ini menjadi penting meletarbelakangi bagaimana dampak Mata Pelajaran Kewarganegaraan di sekolah pada mahasiswa. Mengingat pada sekolah dasar dan menengah mahasiswa mempelajari konten kewarganegaraan, untuk memahami sejauh mana tantangan.

Hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan perubahan kurikulum sangat penting, karena pembaruan dan revisi kurikulum dapat memastikan bahwa siswa menerima pemahaman yang komprehensif dan terkini. Sejarah modifikasi terhadap kurikulum Indonesia paling signifikan di Indonesia: Kurikulum pertama yang digunakan di Indonesia dikembangkan pada tahun 1947. Kurikulum ini menekankan pendidikan umum, bakat, dan budi pekerti. Nasionalisme, agama, dan moralitas sangat ditekankan dalam kurikulum ini. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum pertama yang menitikberatkan pada pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini menempatkan fokus yang kuat pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika. Juga, ia menawarkan disiplin ilmu yang lebih praktis, seperti kejuruan. Kurikulum 1975 Mata kuliah teknologi, sains, dan ilmu sosial diperkenalkan ke dalam kurikulum nasional pada tahun 1975. Kurikulum ini mencakup disiplin ilmu baru di Indonesia seperti sejarah, geografi, biologi, dan matematika. Kurikulum 1994 berupaya untuk sekaligus mendidik akademisi dan karakter unggul. Kurikulum ini mencakup topik-topik seperti keterampilan hidup, sejarah daerah, seni dan budaya (Kompas Cyber, 2022). Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)”. Tidak banyak yang berbeda dari Kurikulum 2004, mulai dari tinjauan dari segi isi, proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi. Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari Kurikulum 2006 (KTSP). Pada Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikburistek pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sendiri terdiri atas nilai-nilai (M. Althaf, Romanti, 2022).

Penelitian tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan Indonesia mengidentifikasi kompetensi abad ke-21 yang dibutuhkan karena menjadi masalah utama pada kesuksesan global, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara dan mempersiapkan siswa untuk abad ke-21 (Jayadiputra et al., 2020). Pendidikan dalam pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada pemahaman struktur pemerintahan, proses-prosesnya, dan karakteristik berbagai bangsa. Ini bertujuan untuk melibatkan generasi dalam partisipasi publik dan mengkritik tindakan pemerintah. Indonesia menghadapi tantangan di berbagai bidang, termasuk konflik di Pulomas, Jakarta Timur, dan kurangnya kerjasama antar komunitas (Zakiah et al., 2023).

Kajian “Pengintegrasian Pendidikan Karakter ke Dalam Model Pembelajaran RECE (reflective, engage, collaborative, and elaborative) melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” berfokus pada pengintegrasian program pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia, melibatkan guru, staf sekolah, dan siswa mengidentifikasi situasi dan masalah dalam proses pengajaran (Sarkadi et al., 2022). Isu utama yang dibahas pentingnya kewarganegaraan berbasis kompetensi dalam teknologi abad 21 di Indonesia sebagai masalah yang diidentifikasi, dengan fokus pada pembangunan nasional, pendidikan, dan kompetensi profesional. Ini juga menekankan pentingnya iman sebagai lingkungan belajar (Martini et al., 2019).

Kurangnya penekanan pada pembentukan karakter: Praktek pendidikan kewarganegaraan di kelas saat ini cenderung hanya fokus pada tujuan kognitif, seperti perolehan pengetahuan, sementara mengabaikan pengembangan karakter dan sikap siswa (Suardi et al., 2019). Sedangkan tantangan yang dihadapi guru MAN 3 Banyuwangi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di kelas PPKn adalah kurangnya RPP yang sesuai dengan prinsip 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Komunikasikan). Mereka perlu meningkatkan metode pengajaran, melibatkan siswa, dan memastikan semua siswa selaras dengan kurikulum (Hariyono & Harjianto, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace mengungkapkan bahwa 83,3% mahasiswa Indonesia percaya bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang dianggap permanen. Survei menemukan bahwa 56% siswa percaya bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang dianggap permanen. Studi ini juga menemukan 947 siswa terlibat dalam survei, dengan 947 siswa dari Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang. Survei tersebut juga menemukan bahwa 99,3% siswa percaya bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang dianggap permanen. Survei tersebut juga menemukan bahwa 51,8% siswa percaya bahwa Indonesia adalah contoh negara yang menghargai Islam, sedangkan

56,3% percaya bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang dianggap permanen (Wardah, 2023). Adanya krisis karakter dan jati diri bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa nilai budaya dan agama Indonesia menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika di sekolah, mengedepankan kerukunan dan globalisme, serta mengedepankan masyarakat yang harmonis (Andriadi et al., 2020). Ini menjadi pertanyaan kenapa implementasi kurikulum darurat melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus dilakukan. Pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdampak, berdasarkan masalah yang diidentifikasi sumber daya manusia terbatas dalam IT, sehingga terjadi kesulitan dalam indikator pencapaian hasil belajar, membentuk etika peserta didik (Asnawi et al., 2022).

Sejumlah isu utama dalam latar belakang penelitian ini mendasari konsep untuk merancang penelitian evaluasi menggunakan effectiveness model, Objectives-Centered Model, dan matching model untuk mengevaluasi kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan. Evaluasi pada penelitian ini dirancang untuk mendukung program agar memberikan penilaian yang ketat terhadap kurikulum dalam hal ini Mata Pelajaran Kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum. Mengidentifikasi evaluasi bergantung pada pendekatan menggabungkan desain difference-in-differences dengan score matching dan akan menggunakan data dari midline survey dan survei follow-up (ILO, 2018). Sedangkan evaluasi program dapat dilakukan untuk tujuan effectiveness model, dan Objectives-Centered Mode untuk meningkatkan atau mengarahkan kembali program atau kebijakan dan menginformasikan keputusan tentang apakah akan melanjutkan, menghentikan, mereplikasi atau meningkatkan program atau kebijakan (Rogers, 2014).

Kurikulum memungkinkan pilihan individu dan harus mempersiapkan individu untuk komunitas global dimana bangsa mereka sendiri dianggap sebagai bagian dari keseluruhan global yang lebih besar (Wahlström et al., 2018). Evaluasi kurikulum pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan proses penting yang membantu untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pendidikan. Hal ini penting untuk menentukan tujuan, isi, metode, penilaian, dan hasil dari suatu program. Selanjutnya memutuskan apakah akan menerima atau menolak suatu program, memastikan perlunya revisi isi, membantu pengembangan materi kurikulum di masa depan untuk perbaikan terus-menerus, dan meningkatkan metode pengajaran dan teknik pengajaran. Penelitian ini menawarkan peningkatan hasil belajar siswa, memastikan keselarasan dengan standar dan tujuan, mengidentifikasi area untuk perbaikan, memberikan

akuntabilitas, dan memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi tujuan dan sasarannya. Lebih dari itu penelitian ini akan merekonstruksi kurikulum yang sesuai dan tepat untuk mata pelajaran kewarganegaraan, yang akan menghasilkan konsep dan teori yang berkelanjutan yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kurikulum dapat dirancang mencapai tujuan pembelajaran tertentu, serta bagaimana kurikulum dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus.

1.2. Batasan Masalah

Masalah utama kurikulum termasuk pendanaan pemerintah, politik, keamanan sekolah, kebijakan disipliner, teknologi dalam pendidikan, standar kompetensi, gaji guru, dan pengajaran evolusi. Pembuat kebijakan dan pendidik perlu mengatasi masalah ini untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan berkualitas tinggi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan pasar kerja, dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, inklusif dan tanggap secara budaya, terintegrasi di seluruh mata pelajaran dan tingkat kelas, dinilai secara teratur, cukup fleksibel untuk memasukkan teknologi baru, metode pengajaran, dan perangkat pembelajaran, serta didukung oleh pelatihan dan pengembangan guru khususnya pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan.

Begitu pentingnya kurikulum pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan untuk dilakukan penelitian yang akan berdampak besar secara fundamental bagi keberlangsungan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Fokus penelitian terbatas pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas membatasi ruang lingkup penelitian kurikulum ini. Secara lebih rinci pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas antara Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar;
2. Menganalisis Mata Pelajaran Kewarganegaraan antara Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah menengah atas sebagai cara masyarakat mentransmisikan sistem nilai kepada generasi berikutnya;
3. Merekonstruksi kurikulum yang sesuai dan tepat untuk mata pelajaran kewarganegaraan, yang akan menghasilkan konsep dan teori dan imlementasi yang berkelanjutan yang memberikan pemahaman bagaimana kurikulum dapat dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran.

1.3. Rumusan Masalah

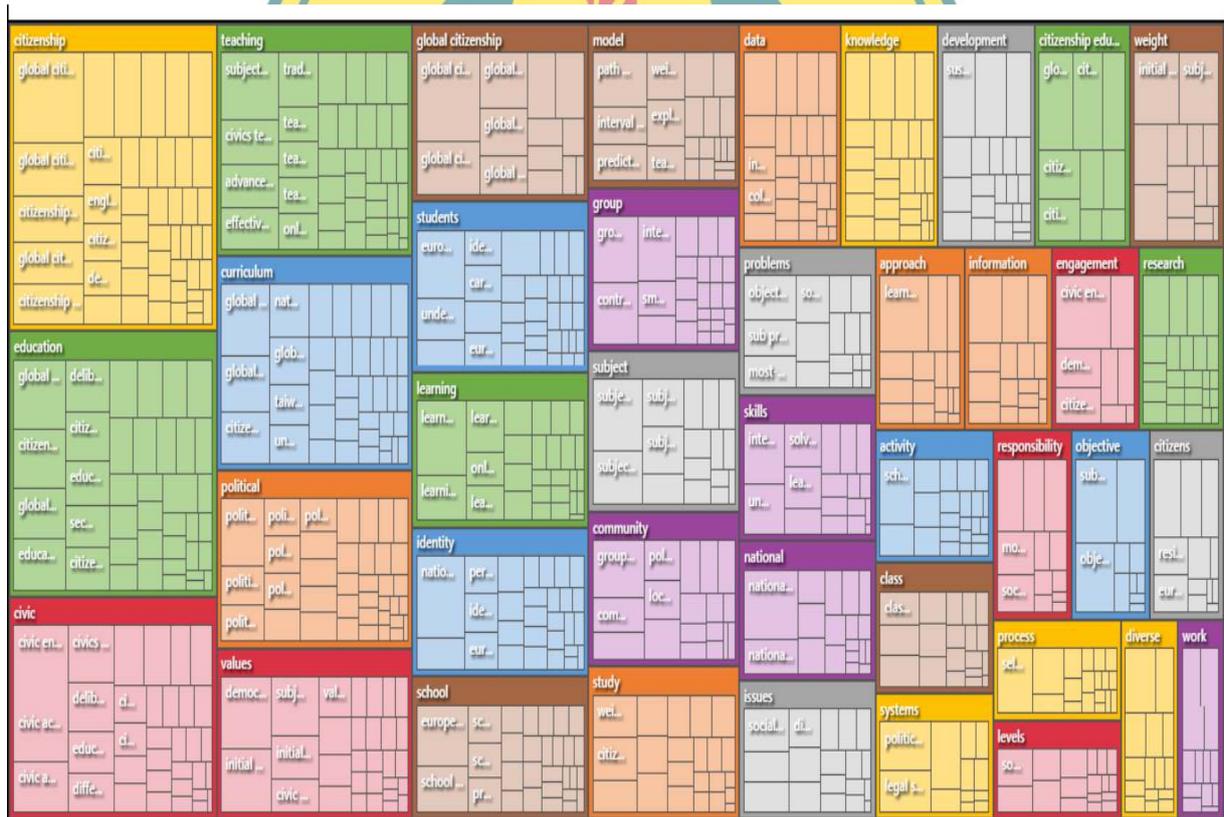
1. Bagaimana sistem yang mendasari Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar dalam konteks Mata Pelajaran Kewarganegaraan?
2. Apakah ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan nasional antara Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Bagaimana integrasi kurikulum kedalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
4. Apakah kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang handal dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif pada mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah menengah atas?
5. Bagaimana kurikulum yang ideal dan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus pada pendidikan kewarganegaraan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi konsep Mata Pelajaran Kewarganegaraan antara Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar yang membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia (pendidikan karakter) dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia;
2. Sebagai langkah untuk menentukan konteks Mata Pelajaran Kewarganegaraan pada kurikulum seperti pemilihan tujuan, isi, penataan isi, sistem pendidikan nasional;
3. Mencocokkan antara tujuan, muatan, metode, dan penilaian pada kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan;
4. Menguji, menganalisis dan mengkonstruksi kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan;
5. Strategi mengelola relevansi materi Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan hakikat tujuan, muatan, metode, dan penilaian dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan antara sistem pendidikan nasional Sekolah Menengah Atas.

1.5. State of the Art Citizenship Curriculums

Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan aplikasi Nvivo dari data menggunakan pendekatan systematic reviews yang memakai metode-metode systematic untuk mengumpulkan data sekunder untuk mengidentifikasi, menilai dan memilih studi yang sesuai, hingga sintesis datanya diketahui bahwa State of the Art. Penelitian SOTA, peneliti harus melakukan studi pustaka yang cermat, mencari dan mempelajari jurnal, artikel, dan publikasi terkait terbaru dalam bidang penelitian. Melalui Nvivo memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan data ke dalam tema atau kategori tertentu sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Prosedur pengolahan data Nvivo untuk mengetahui State Of The Art sebelumnya dilakukan penelusuran pada website <https://www.scopus.com/>, kriteria penelusuran judul artikel, abstrak dan keyword dengan kata kunci citizenship curriculum didapati 226 artikel yang relevan dengan rentang waktu 2019-2023, artikel lalu di seleksi sesuai kriteria mendapatkan hasil 112 topik publikasi.





Gambar 1.1 Pengolahan data menggunakan NVivo 12. VERSI12.0.0.71. Plus (32bit) ©1999-2018

Hasil penelitian terdahulu diidentifikasi tentang penelitian kewarganegaran, menunjukkan permasalahan mengenai kata kunci yang dikoding menggunakan aplikasi NVivo 21 citizenship, education, civic, citizenship curriculum, students, curriculum, teaching, device, system, approach, school, development, identity, dan national. Dari penelitian terdahulu tersebut meskipun banyak penelitian tentang kewarganegaran akan tetapi belum ada penelitian yang mengevaluasi Mata Pelajaran Kewarganegaraan di Sekolah Menengah

Atas menggunakan evaluasi Effectiveness Model, Objectives-Centered Model, dan Matching Model. Oleh karena itu penelitian ini akan ikut serta merekonstruksi kurikulum yang sesuai dan tepat untuk Mata Pelajaran Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas, yang akan menghasilkan konsep dan teori yang berkelanjutan yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kurikulum dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Serta bagaimana kurikulum dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Hasil seleksi pada penelitian terdahulu menjadi referensi membantu membuat kerangka konseptual atau penelitian ini. Dengan melakukan penelitian SOTA dengan pendekatan systematic reviews, penelitian dapat memastikan bahwa penelitian ini mengikuti tren terbaru di bidangnya dan akan menghasilkan kontribusi baru yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.6. Road Map Penelitian



Gambar 2. 2 Roadmap Penelitian

Tahun 2021-2022: Kajian Literatur dan Pengembangan Instrumen Penelitian. Pada periode inisiasi, dilakukan telaah mendalam terhadap penelitian relevan guna memahami konteks dan temuan terkini. Analisis kritis terhadap penelitian terdahulu menjadi dasar untuk merumuskan kriteria evaluasi dan pengembangan instrumen penelitian. Langkah selanjutnya adalah validasi isi instrumen oleh para ahli pendidikan untuk memastikan akurasi dan relevansi isi.

Tahun 2022-2023: Validasi Isi, Pengumpulan, dan Analisis Data. Tahap ini menitikberatkan pada validasi isi instrumen melalui interaksi dengan ahli pendidikan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan instrumen yang telah divalidasi. Analisis data dilakukan secara teliti untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait materi pembelajaran kewarganegaraan. Rekomendasi penelitian dibuat berdasarkan temuan analisis data sebagai panduan pengembangan lebih lanjut. Hasil penelitian diseminarkan dalam forum internasional.

Tahun 2023-2024: Implementasi Strategi dan Diseminasi Tingkat Tinggi. Pada periode ini, penelitian diarahkan pada implementasi hasil penelitian dalam praktik pendidikan. Hasil penelitian diintegrasikan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan fokus pada strategi pengelolaan relevansi materi pembelajaran kewarganegaraan. Publikasi internasional yang berkualitas tinggi menjadi landasan diseminasi hasil penelitian. Penelitian juga menjadi kontribusi kunci dalam naskah akademik yang merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Keberhasilan penelitian tercermin melalui rujukan dan sitasi karya dalam literatur pendidikan global, memperkuat kontribusi dan kredibilitas penelitian ini.

